

Rilis Seknas FITRA. Selasa 12 Mei 2015

Sinyal Waspada Pengelolaan APBN Kabinet Jokowi JK

Sampai saat ini, rendahnya penyerapan anggaran menjadi penyakit kambuhan yang terjadi pada setiap tahun anggaran. Padahal, berbagai sistem telah didesain dalam mendorong percepatan penyerapan APBN di Kementerian/Lembaga. Realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan Negara Perubahan (APBN-P 2015) masih rendah, sepanjang Januari-Maret 2015 hanya mencapai 18,5 persen.

Catatan :

- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil menyatakan, penyerapan anggaran 18,5 persen terbesar untuk belanja pegawai dan belanja transfer daerah.
- Kementerian Keuangan mencatat hingga awal tahun ini serapan anggaran infrastruktur baru mencapai 0,02 persen dari total alokasinya. Anggaran infrastruktur per 27 April hanya terserap Rp 7 triliun, padahal anggarannya mencapai Rp 290 triliun.
- Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015 Kementerian Perhubungan yang baru mencapai 10% dari seluruh anggaran Rp. 65triliun.
- Menteri PU Basuki menjelaskan lambatnya penyerapan anggaran per 20 April 2015 masih 2,41 persen. Alokasi APBN 2015 untuk Kemempupera sebesar Rp. 84,91 triliun dan mendapatkan tambahan APBNP 2015 sebesar 40 persen atau Rp33,63 triliun. Namun, penyerapan anggaran baru 2,41 persen dari rencana 11,7 persen per 20 April 2015, sementara waktu efektif tinggal tujuh sampai delapan bulan.
- Desifat anggaran diperkirakan akan melebar diatas 2 persen dari target awal 1,9 persen APBN P 2015.
- Dana Penanaman Modal (PMN) Rp. 70 Triliun oleh Kementrian BUMN ternyata belum berdampak pada kinerja BUMN, justru menjadi bancakan BUMN dan elit.
- Paket Kebijakan Pelemahan Rupiah justru semakin membuka peluang dominasi da asing. Yaitu Kebijakan pertama adalah insentif pajak yang akan diberikan pada pengusaha yang berorientasi ekspor dan melakukan reinvestasi. Selanjutnya adalah dengan meningkatkan penggunaan biofuel pada solar dari 10 ke 15 persen. Selain untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak, peningkatan biofuel ini juga demi kepentingan lingkungan. Ketiga adalah penerapan bea masuk anti dumping dan pengamanan sementara. Sofyan mengatakan kebijakan ini akan lebih mudah diterapkan karena Kementerian Keuangan akan membuat akun khusus di luar kas negara untuk menampung bea masuk anti dumping sementara. Sehingga jika dugaan dumping tak terbukti, uang akan segera dikembalikan dalam waktu 10 hari. erakhir adalah pembebasan visa pada 4 negara baru, yaitu Jepang, Korea Selatan, Cina, dan Rusia. Sehingga total negara bebas visa saat ini ada 19. Aturan bebas visa ini, kata dia, diterapkan karena turis merupakan faktor yang paling cepat mendatangkan devisa.
- Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir April 2015 mencapai USD298,9 miliar atau sekitar Rp3.836 triliun (kurs Rp12.834/USD). Angka ini tumbuh 9,4% secara year on year (yoy).

Realisasi Pendapatan

- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) melaporkan hingga 30 April 2015, jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan sebanyak Rp

310,1 triliun. Angka tersebut baru menyentuh 23,95 persen dibandingkan target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 sebesar Rp 1.294,25 triliun.

- Jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun lalu, penerimaan pajak selama empat bulan tersebut tercatat lebih rendah 1,29 persen. Sebab sampai April 2014, DJP yang ketika itu berhasil mengumpulkan penerimaan pajak sampai Rp 314,13 triliun.

Masalah Rendahnya Penyerapan :

- Dipengaruhi oleh perubahan nomenklatur dan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) baru disusun dan efektif Mei 2015.
- Rencana Kerja Kementerian belum berbasis kinerja dan mendorong tujuan Nawacita.
- Kurangnya koordinasi antar Kementerian dalam penyerapan dan kinerja alokasi anggaran.
- Secara internal, beberapa posisi penting di beberapa kementerian seperti Dirjen masih kosong. Sehingga dapat mengganggu penyerapan anggaran dan kinerja pemerintah.

Jalan Keluar

Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, sebenarnya penyerapan anggaran bukan merupakan target alokasi anggaran. *Performance Based Budget* lebih menitikberatkan pada kinerja ketimbang penyerapan itu sendiri. Hanya saja, kondisi perekonomian kita saat ini variabel dominan pendorong pertumbuhannya adalah faktor konsumsi, sehingga belanja pemerintah yang merupakan konsumsi pemerintah turut menjadi penentu pertumbuhan tersebut.

Kegagalan target penyerapan anggaran memang akan berakibat hilangnya manfaat belanja. Karena dana yang telah dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan yang berarti terjadi *idle money*. Padahal apabila pengalokasian anggaran efisien, maka keterbatasan sumber dana yang dimiliki negara dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan strategis. Dalam konsep dasar ilmu ekonomi, *basic problem* yang dihadapi oleh manusia adalah keterbatasan sumber dana sebagai alat pemenuhan kebutuhan dihadapkan pada kebutuhan yang jumlahnya tak terbatas. *Basic problem* ini juga dihadapi oleh suatu negara termasuk Indonesia. Sumber-sumber penerimaan negara yang terbatas, dihadapkan pada kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas, mengharuskan Pemerintah menyusun prioritas kegiatan dan pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien. Oleh sebab itu, ketika penyerapan anggaran gagal memenuhi target, berarti telah terjadi inefisiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran. Namun, dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja atau *Performance Based Budget*, pencapaian target penyerapan anggaran bukan merupakan indikator kinerja (*performance indicator*).

Rekomendasi :

1. Seluruh Kementerian perlu berpatokan pada alokasi anggaran berbasis kinerja, sehingga tidak terpatok pada penyerapan anggaran saja. Jika orientasi pada kinerja, maka secara otomatis penyerapan anggaran akan tergenjot dan anggaran cair untuk program peningkatan kinerja. Tidak asal meningkatkan pencairan.

2. Bagaimanapun, jika kinerja bagus, penyerapan akan mengikuti dan akhirnya kinerja ekonomi dapat membaik seiring dengan pengeluaran pemerintah yang mampu menggerakkan perekonomian.
3. Dari sisi pelaksana, Presiden perlu mengevaluasi kinerja Para Menterinya, khususnya dalam pengelolaan anggaran berbasis kinerja. Karena, waktu tinggal tujuh bulan lagi untuk realisasi APBN-P 2015.
4. Secara khusus, Presiden perlu mengevaluasi kinerja Tim Ekonomi dan Keuangan. Dalam empat bulan pertama ini, terlihat koordinasi yang kurang solid sehingga beberapa kebijakan misalnya paket penanganan pelemahan rupiah belum berhasil. Kurang solidnya kinerja Tim Ekonomi dan Keuangan berdampak pada kinerja anggaran dan ekonomi.
5. Melihat hal ini, dan merespon dari desakan publik Presiden perlu mempertimbangkan mengganti tim Keuangan dan ekonomi (Menkeu, Menteri BUMN dan Menko Ekonomi) yang lebih mampu mengelola anggaran kinerja dengan baik.

Demikian.

Seknas FITRA

081333111446